

JERIT 'PERINGATAN DARURAT' WARGANET INDONESIA

Kesepakatan Kilat RUU Pilkada, MKMK Sebut Pembangkangan Konstitusi

Foto ataupun video menggambarkan Garuda Biru bertuliskan 'Peringatan Darurat' memenuhi lini masa media sosial pada Rabu (21/8/2024). Konten ini memuncaki trending topic dengan 3 tagar utama #KawalPutusanMK; #TolakPilkadaAkal2an dan #TolakPolitikDinasti. Begitu banyak warganet Indonesia termasuk tokoh hingga selebritas mengunggahnya saat Badan Legislasi (Baleg) DPR diduga sedang secepat kilat mengakali aturan Pilkada 2024 menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu isinya, Baleg menyepakati, UU Pilkada mengacu pada putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 diketok pada 29 Mei 2024. Putusan terkait mengubah syarat usia calon kepala daerah yaitu calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Diperkirakan, pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan pada awal Januari 2025. Sehingga langkah Kaesang Pangarep--putra Presiden Jokowi--maju pilgub tak terhambat. Artinya, Baleg tak mengindahkan putusan MK nomor 70 yang menyebut seseorang bisa maju Pilkada bila usia 30 tahun saat penetapan. Penetapan calon dijadwalkan 22 September 2024. Tak hanya itu, Baleg juga tidak menerapkan seluruh putusan MK soal ambang batas parpol dalam Pilkada 2024. Pasal 40 di ayat 1 soal syarat batas kursi yang tadinya diubah oleh putusan MK dikembalikan lagi oleh Baleg. Jadi partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20 persen di DPRD. Tapi, ditambahkan nomenkelatur bila putusan MK 'hanya khusus untuk partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD'. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyebutnya putusan Baleg sebagai pembangkangan konstitusi yang telanjang. Sementara, gaung dari netizen, bakal berubah menjadi demo di dunia nyata di seluruh negeri pada Kamis (22/8/2024) hari ini. "Ini bukan tentang siapa, tapi tentang negeri kita!" seruan yang digaungkan untuk aksi turun ke jalan.

**GOVERNMENT (Hal.2)
Rupiah Melemah
Usai BI Rate
Ditahan di Level
6,25 Persen**

Baca di hal 11....

PERINGATAN DARURAT

BALEG DPR RI ANULIR PUTUSAN MK SOAL PILKADA

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024

Ketentuan pasal 40 MK diubah Baleg DPR RI sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi syarat perolehan minimal 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari total akumulasi suara sah dalam pemilihan umum DPRD di daerah tersebut.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dengan ketentuan:

a. Di provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh paling sedikit 10% dari total suara sah untuk dapat mengikuti pemilu.

b. Di provinsi dengan jumlah penduduk antara 2.000.000 hingga 6.000.000 jiwa, persyaratan suara sah yang harus diperoleh adalah 8,5%.

c. Di provinsi dengan jumlah penduduk antara 6.000.000 hingga 12.000.000 jiwa, partai politik harus memperoleh minimal 7,5% dari total suara sah.

d. Di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa, persyaratan untuk memperoleh suara sah adalah minimal 6,5%.



Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD kabupaten/kota dapat mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan syarat tertentu.

a. Di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh setidaknya 10% dari total suara sah untuk mendaftarkan calon.

b. Di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk antara 250.000 hingga 500.000 jiwa, persyaratan minimum suara sah yang harus diperoleh adalah 8,5%.

c. Di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk antara 500.000 hingga 1.000.000 jiwa, partai politik harus memperoleh minimal 7,5% dari total suara sah.

d. Di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, persyaratan untuk memperoleh suara sah adalah minimal 6,5%.

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024

MK memutuskan bahwa usul pencalonan seorang kepala daerah terhitung pada saat ditetapkan, bukan saat dilantik.

Tapi Baleg DPR RI menyepakati untuk mengulit rujuk dari putusan MA mengenai syarat usia minimal calon kepala daerah. "Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur serta 25 untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota, terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih," bunyi catatan rapat baleg.

Rupiah Melemah Usai BI Rate Ditahan di Level 6,25 Persen

JAKARTA—Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Rabu (21/8/2024) melemah 64 poin atau 0,41 persen menjadi Rp15.500 per dolar AS. Hal ini menyusul keputusan Bank Indonesia (BI) menahan BI Rate di level 6,25 persen.

Diketa Rupiah sebelumnya sebesar Rp15.436 per dolar AS. "Dalam jangka pendek, penurunan BI-Rate dapat menyebabkan pelemahan rupiah," kata analis ICDX Taufan Dimas Hareva di Jakarta.

Menurut Taufan, investor mungkin menarik dananya ke luar negeri mencari imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Sebaliknya, menahan BI-Rate dapat membantu menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Suku bunga yang relatif stabil bisa menarik investor asing yang mencari imbal hasil yang konsisten, sehingga mendukung nilai tukar rupiah.

Dari sisi eksternal, ada kemungkinan pelonggaran suku bunga Amerika Serikat (AS) pada September 2024 yang mulai diisyaratkan dalam sejumlah pernyataan petinggi bank sentral AS atau The Fed beberapa hari terakhir dan menjadi sentimen positif bagi pergerakan rupiah.

Saat ini, para pelaku pasar berfokus pada pidato Ketua The Fed, Jerome Powell, yang berpotensi memberikan informasi terkait pendekatan pelonggaran kebijakan ekonomi AS dalam pidatonya pada Jumat di acara The Jackson Hole Economic Symposium, dan hal itu juga akan memberikan arah gerak kepada mata uang Rupiah ke depannya.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu menguat ke level Rp15.456 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.480 per dolar AS.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (21/8/2024) mengatakan, "Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Agustus 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00%."

Tapi BI membuka peluang penurunan suku bunga acuan baru akan berlangsung pada kuartal IV 2024, meski sejumlah penilaian ekonomi ini saat yang tepat untuk memangkas BI rate.

Perry menjelaskan alasan bank utama sentral menahan BI rate di level 6,25% karena lebih fokus untuk menjaga stabilitas penguatan nilai



Gubernur BI Perry Warjiyo

tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang secara fundamental dianggap masih cenderung terus menguat.

"Kami masih tetap akan melihat ruang terbuka bagi penurunan BI rate pada kuartal IV, sementara triwulan III kami fokus untuk memperkuat lebih lanjut stabilitas nilai tukar rupiah," kata Perry.

Perry menilai penguatan rupiah baik untuk perekonomian Indonesia. Peralnya, hal ini membuat harga pangan menjadi lebih murah, dan mendukung inflasi rendah, khususnya inflasi impor. Selain itu, penguatan rupiah juga mendukung sektor industri yang terkait dengan kandungan barang impor tinggi.

"Terutama sektor terkait barang impor yang menciptakan lapangan kerja, contohnya industri tekstil, manufaktur yang padat karya, banyak butuh impor," kata Perry.

Bank Indonesia (BI) mengimbau pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga demi mencapai pertumbuhan ekonomi 2024 sesuai target. Bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada di kisaran 4,7%-5,5%, serupa dengan proyeksi sebelumnya.

Soroti Konsumsi Rumah Tangga

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan ekonomi ke depan perlu terus didorong, sehingga tetap dapat menjaga keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian nasional.

"Khususnya konsumsi rumah tangga perlu semakin ditingkatkan, seiring berakhirnya faktor musiman hari besar keagamaan nasional dan dampak pelaksanaan Pemilu pada semester I 2024," kata Perry.

"Mengenakan stimulus fiskal pada tahun 2024 dari 2,3% menjadi 2,7% dari PDB (produk domestik bruto)

diharapkan efektif memberikan dampak positif terhadap penganda perekonomian," lanjut Perry.

Perry memaparkan, pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang berkelanjutan diperkirakan dapat meningkatkan investasi, khususnya investasi swasta.

Sampai saat ini, dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi domestik tetap baik, didukung permintaan domestik dan ekspor. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2024 tercatat 5,05% (year-on-year /yoy), terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, ekspor tercatat meningkat, didukung oleh permintaan mitra dagang utama dan peningkatan ekspor jasa.

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tercatat meningkat di sebagian besar wilayah Indonesia dengan pertumbuhan tertinggi di Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Maluku dan Papua.

Pada kesempatan itu, BI melaporkan kredit perbankan tumbuh 12,40% pada Juli 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year /yoy).

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan, berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 15,2% (yoy), kredit modal kerja yang meningkat 11,6% (yoy), dan konsumsi kredit yang naik 10,98% (yoy) pada Juli 2024.

"Pembiayaan syariah dan kredit UMKM (usaha menengah, kecil, dan mikro) tumbuh masing-masing sebesar 11,75% (yoy) dan 5,16% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 diperkirakan berada pada batas atas kisaran 10-12%," papar Perry.

Dia menambahkan pertumbuhan

PERKEMBANGAN BI RATE PERIODE 2024

17/01/2024

6.0

21/02/2024

6.0

20/03/2024

6.0

24/04/2024

6.25

22/05/2024

6.25

20/06/2024

6.25

17/07/2024

6.25

21/08/2024

6.25

Sumber: Bank Indonesia

kredit bersumber dari permintaan korporasi, sejalan dengan kinerja penjualan yang masih kuat. Sementara itu, permintaan kredit rumah tangga masih tinggi, terutama pada kredit pemilihan rumah (KPR).

"Secara sektoral, pertumbuhan kredit yang tinggi terjadi pada sebagian besar sektor ekonomi, terutama pada sektor Industri, Listrik, Gas, dan Air (LGA), dan Pengangkutan," ujar Perry.

Pada saat ini, perkembangan kredit perbankan juga terjadi di sisi penawaran. Menurut dia, minat penyaluran kredit didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) Juli 2024 yang tercatat sebesar 7,72% (yoy), strategi realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, serta dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI. (sum,rls,ant/dya)

Potensi Penyelewengan Tinggi DPR Peringatkan Pengawasan Maksimal Dana Desa

JAKARTA - Komisi V DPR RI mengingatkan pemerintah, terutama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), mengenai pentingnya pengawasan yang maksimal terhadap penggunaan Dana Desa.

"PR berat kita adalah bagaimana kita melakukan pengawasan maksimal terhadap penggunaan Dana Desa," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Menurut dia, pengawasan yang maksimal terhadap penggunaan Dana Desa itu bernilai penting untuk memastikan dana tersebut sepenuhnya dimanfaatkan dalam membangun desa dan menyejahterakan masyarakat desa.

Lasarus menyampaikan sejauh ini masih terdapat kepala-kepala desa yang tersangkut masalah, seperti korupsi, akibat melakukan pelanggaran dalam penggunaan Dana Desa.

"Per hari ini ada banyak kepala desa yang tersangkut masalah terkait pelanggaran dalam penggunaan Dana Desa. Ini PR besar kita selama lima tahun," kata dia.

Ia pun menyampaikan pengawasan yang maksimal diperlukan pula, menyusul adanya rencana pemerintahan berikutnya di bawah pimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menaikkan anggaran Dana Desa.

187 Kasus Korupsi di Desa

Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah kasus korupsi di tingkat desa paling besar di sepanjang 2023. Menurut ICW, selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa. Dari temuan mereka, aksi korupsi terbesar selain sektor pedesaan adalah pemerintahan (108 kasus), utilitas (103 kasus), dan perbankan (65 kasus).

"Memang, jika dibandingkan dengan jumlah desa yang secara keseluruhan mencapai 75.265 desa di seluruh Indonesia, jumlah kasus korupsi yang berhasil terpantau tergolong kecil," demikian tulis ICW dalam Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 beberapa waktu lalu.

"Namun penting ditekankan bahwa hal ini bisa jadi merupakan



Penyaluran BLT Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

fenomena gunung es, di mana patut diduga kasus-kasus lain di sektor desa belum terungkap oleh penegak hukum," lanjut ICW.

Aksi korupsi pada sektor desa tercatat merugikan negara sekitar Rp 162,2 miliar pada 2023. Menurut ICW, peningkatan korupsi di desa tidak terlepas dari disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat alokasi dana desa. Sebab pada 2023, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 68 triliun untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia. Artinya, rata-rata satu desa dapat mengelola dana desa sebesar Rp 903 juta.

"Kendati anggaran ini ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan, tetapi tanpa prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, dana desa dikhawatirkan menjadi ladang basah korupsi," papar ICW.

Meskipun mencatatkan jumlah kasus terbanyak, korupsi dana desa bukan sektor yang menimbulkan kerugian negara terbesar akibat korupsi. PP

Sebelumnya, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jaka Sucipta, mengungkapkan kalau tahun ini, ia akan mengalokasikan

Dana Desa TA sebesar Rp71 triliun.

Rinciannya, halaman Rp71 triliun ini akan dialokasikan kepada 75.259 Desa di 434 kota/kabupaten. Dengan demikian, setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp943,34 juta.

"Tahun 2023 lalu, kami memperkenalkan yang namanya insentif desa. Jadi, alokasi pagu dana desa ada yang kami bagi dalam tahun berjalan, ada yang kami bagi pada tahun sebelumnya," tutur Jaka, Mei lalu.

Misalnya, untuk tahun 2024 ini, pengalokasian dana desa sebesar Rp69 triliun dihitung sebelum tahun anggaran berjalan, yakni tahun 2023. Sementara, Rp2 triliun, dicairkan sebagai insentif desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.

Jaka menambahkan, bahwa insentif desa ini didistribusikan berdasarkan kinerja dan kinerja dari desa tersebut. Ini serupa dengan

pemberian insentif daerah untuk mengapresiasi kinerja daerah peraih dana.

"Rp2 triliun ini dibagikan kepada desa-desa yang kinerjanya baik. Jadi, kalau di daerah ada yang namanya insentif daerah, makanya mulai tahun 2023, kami mulai memperkenalkan insentif desa, untuk desa yang berkinerja baik," terang Jaka.

Sementara, dana desa yang digelontorkan tahun sebelumnya

disusun berdasarkan formula, yang jika dijumlahkan, mencapai 100 persen. Formula yang dimaksud, yakni alokasi dasar (AD) dengan bobot 65 persen, alokasi afirmasi (AA) yang berbobot 1 persen, alokasi kinerja (AK) sebesar 4 persen, dan alokasi formula (AF) 30 persen.

AD dibagi secara merata ke setiap desa dan dikelompokkan berdasarkan jumlah penduduk. Sementara itu, AA disalurkan secara proporsional kepada desa yang terbelakang dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.

Lalu, AK dialokasikan kepada desa dengan kinerja terbaik, yang dinilai bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Terakhir, AF diberikan berdasarkan berbagai indikator, seperti luas desa, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan.

Lebih spesifiknya, Jaka mengungkapkan kalau maksimal 25 persen dana desa ini disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk anggota kemiskinan ekstrem. Dana desa juga digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan pencegahan stunting, serta untuk biaya operasional, sesuatu yang banyak dibutuhkan oleh desa.

"Tadinya, operasionalnya tidak boleh digunakan dari dana desa. Namun, karena banyaknya kebutuhan, maka dana desa akhirnya bisa untuk keperluan operasional. Kita batasi maksimalnya 3 persen," tukasnya.

Sebelumnya Menteri Desa (Mendes) PDTT Abdul Halim Iskandar telah menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mengingatkan para kepala desa agar benar-benar memanfaatkan Dana Desa untuk kesejahteraan rakyat.

"Manfaatkan Dana Desa untuk kesejahteraan rakyat, saya yakin kalau semua cara berpikir kepala desa seperti itu, tidak ada ruang untuk penyelewengan," kata Gus Halim, sapaan Mendes PDTT.

Selanjutnya dia mengingatkan pula bahwa tugas kepala desa adalah menyejahterakan warganya. Dengan demikian, kata dia, sudah sepatutnya kades benar-benar menjalankan tugasnya tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Tugas kepala desa adalah khidmat kepada masyarakat, tugas kepala desa adalah menyejahterakan warganya. Kalau tugas itu betul-betul menyatu dengan dirinya, maka tidak mungkin ada yang namanya penyimpangan Dana Desa," ucap Gus Halim. (wid,rls,tro/dya)



PR berat kita adalah bagaimana kita melakukan pengawasan maksimal terhadap penggunaan Dana Desa,"

Lasarus
Ketua Komisi V DPR RI

Kasus Dokter PPDS Undip Diserahkan Menkes ke Polisi

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kepolisian masih terus menyelidiki dugaan perundungan terhadap mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro, Aulia Risma Lestari. Perundungan itu diduga menjadi pemicu dokter anestesi tersebut melakukan bunuh diri.

"Ya, mudah-mudahan secepatnya nanti bisa polisi sama Kementerian Kesehatan (menuntaskannya)," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Rabu (21/8/2024).

Budi mengaku sudah mendapatkan penjelasan dari keluarga Aulia. "Saya kemarin sudah ketemu keluarga, sudah ketemu ibunya. Jadi, sudah cukup gamblang dan jelas apa yang terjadi," katanya.

Namun, Budi tidak bersedia menjelaskan lebih detail mengenai pembahasan antara dirinya dan keluarga Aulir. "Biarkan polisi yang sedang melakukan penyelidikan."

Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal di kamar kosnya, di Jalan Lemponsari, Kota Semarang pada Senin, 12 Agustus lalu. Ia diduga menyuntik dirinya sendiri menggunakan obat bius sehari sebelum meninggal.

Kasus Aulia ramai di media sosial. Sejumlah netizen pun mengungkap bahwa Aulia itu menjadi korban perundungan seniornya saat menjalani pendidikan di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Kariadi Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, mengatakan tim investigasi lembaganya sedang mendalami dugaan perundungan di balik kematian Aulia. "Masih kami dalam," kata dia, Senin lalu.

Ia mengatakan, jika ada bukti perundungan dan temuan soal pelaku, Kementerian Kesehatan tak akan segan memberi sanksi tegas.

Kepala Kepolisian Resor Semarang Komisaris Besar Irwan Anwar mengatakan polisi telah membentuk tim untuk menyelidiki kematian Aulia tersebut. "Kami sudah bentuk tim untuk menggali informasi terkait adanya dugaan perundungan," kata Irwan di Markas Polres Semarang, Senin lalu, dikutip dari Antara.

Ia mengatakan polisi belum menemukan bukti yang akurat mengenai motif di balik kematian Aulia. Tapi di lokasi kejadian, polisi menemukan alat suntik dan bekas botol Roculax, obat yang dipakai untuk meredakan rasa nyeri.

Irwan melanjutkan, tim kepolisian



Tim dari Kemenkes RI ketika mendatangi keluarga mendiang mahasiswi PPDS Undip Semarang di Tegal, Minggu (18/8/2024).ist

akan berusaha menggali informasi mengenai dugaan perundungan terhadap korban. Mereka akan meminta keterangan dari rekan korban, dokter, serta orang tua korban. "Minggu ini kami akan melakukan pemeriksaan terhadap circle (lingkungan) teman-teman almarhumah, kemudian orang tua, sahabat-sahabat sesama dokter, pacarnya. Sudah mulai hari ini kami lakukan pemeriksaan," ujarnya.

356 Laporan Perundungan

Kemenkes telah menerima banyak laporan tindak perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di perguruan tinggi. Juru Bicara Kemenkes, Dr. M. Syahril mengatakan, sejak Juli 2023 hingga 9 Agustus 2024, pihaknya telah menerima 356 laporan perundungan dengan rincian 211 laporan terjadi di rumah sakit vertikal dan 145 laporan dari luar rumah sakit vertikal.

"Kemenkes akan selalu menindak tegas pelaku bullying," kata Dr. Syahril dikutip dari laman resmi Kemenkes, Rabu (21/8/2024).

Menurut Dr. Syahril, jenis perundungan yang banyak dilaporkan adalah perundungan non-fisik, non-verbal, jam kerja yang tidak wajar.

Selain itu, juga ada mahasiswa PPDS yang dirundung dengan pemberian tugas yang tidak ada kaitan dengan pendidikan serta perundungan verbal berupa intimidasi.

Dari hasil investigasi Kemenkes, kata Dr. Syahril, dilakukan terhadap 156 kasus bullying, sebanyak 39 peserta didik atau residen maupun dokter pengajar atau konsulen telah diberikan sanksi tegas. Sementara itu, untuk 145 laporan di luar rumah sakit vertikal, telah dikembalikan ke instansinya untuk ditindaklanjuti.

Dr. Syahril pun mengajak para

korban perundungan PPDS segera melakukan aduan ke Kemenkes melalui whatsapp 081299799777 dan website <https://perundungan.kemkes.go.id/>.

Nantinya aduan itu akan diterima oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan akan langsung ditelusuri oleh tim Inspektorat. "Kemenkes akan menjamin keamanan identitas pelapor," ujarnya.

"Perundungan dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Kami berharap praktik buruk ini bisa segera dihentikan. Jadi buat teman-teman peserta didik, segera lapor bila mendapat atau menemukan praktik bullying di kanal yang tersedia. Jangan takut," ucap Dr. M. Syahril.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengakui, aksi perundungan memang kerap terjadi di dunia kedokteran. Bahkan, aksi itu bak telah menjadi sebuah 'budaya'.

Koordinator Junior Doctor Network (JDN) IDI, dr. Tommy Dharmawan mengatakan, pola aksi perundungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Salah satunya, pola senioritas yang kurang baik dan paling sering terjadi di PPDS Tanah Air.

"Pola bullying sudah terjadi sangat lama. Pola kultur seperti ini ada, kami tidak menafikkan," ujar dr. Tommy dalam jumpa pers secara daring, Rabu (21/8/2024).

Dokter Tommy berharap, pola senioritas dalam PPDS dihapus. Ia mencontohkan, ada sejumlah dokter yang tidak bisa melakukan praktik di suatu daerah karena sudah dikuasai oleh seniornya.

"Ada beberapa kultur senioritas yang kurang baik. Ada PPDS yang tidak boleh praktik di suatu wilayah karena

Kemenkes sudah menyediakan tiga jenis sanksi terkait perundungan PPDS, yakni:

1. Bagi tenaga pendidik dan pegawai lainnya Sanksi ringan berupa teguran tertulis Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu tiga bulan, dan Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit, dan/atau pemberhentian untuk mengajar.

2. Bagi peserta didik Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis Sanksi sedang berupa skorsing paling sedikit tiga bulan, dan Sanksi berat berupa mengembalikan peserta didik kepada penyelenggara pendidikan dan/atau dikeluarkan sebagai peserta didik.

3. Khusus kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan yang terjadi kasus perundungan di rumah sakitnya:

- Sanksi ringan berupa teguran tertulis
- Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu tiga bulan,
- Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, dan/atau pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit.

sudah ada seniornya, akhirnya (dokter junior) PPDS takut," ungkapnya.

"Senioritas itu ada. Junior belajar dari senior, pola itu ada sistem perundungannya yang harus diputus," lanjut dia.

Selain itu, dr. Tommy juga menyoroti PPDS yang tidak digaji, dan menurutnya menjadi masalah yang ada di Indonesia.

Gaji sangat berpengaruh pada kasus perundungan, sehingga beberapa oknum dokter senior minta diberikan makan, minta diantar, hingga minta diberikan pelayanan di luar akademis.

"Kalau PPDS diberi gaji, minimal mereka bisa beli makan sendiri. Atau ketika anak sakit, bayangkan peserta PPDS rentang usia 27 sampai 35 tahun, mereka harusnya udah punya gaji di usia itu dan berkeluarga. Bayangkan kalau anaknya sakit, keluarganya sakit, tidak ada gaji sama sekali. Bagaimana selama ini mereka menghidupi diri sendiri," tutur dr. Tommy.(tro,rls,ant/dya)

Korupsi Timah Sebesar Rp 420 M JPU Sebut Helena Lim Cs Terancam Pidana Seumur Hidup

JAKARTA - Helena Lim sebagai terdakwa kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu, (21/8/2024). Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) seluruh terdakwa kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terancam hukum penjara seumur hidup. Tidak terkecuali para terdakwa yang terjerat korupsi timah.

"Ancaman hukuman pokoknya tindak pidana korupsi dan TPPU sama seperti pelaku utama yakni seumur hidup," kata JPU Kejaksaan Agung Ardhito Murwadi saat ditemui di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, usai pembacaan dakwaan Helena Lim.

Ardhito mengatakan keterlibatan Helena adalah membantu tindak pidana korupsi dan TPPU terdakwa Harvey Moeis. Helena menyediakan perusahaan bernama PT Quantum Skyline Exchange (PT QSE) sebagai money changer untuk menampung hasil kejahatan para terdakwa lainnya. "Total sekitar 400 miliar rupiah," ujar dia.

Baik Harvey Moeis dan Helena Lim sama-sama tidak mengajukan eksepsi setelah pembacaan dakwaan. Pihak JPU lantas menganggap kedua terdakwa memahami isi dakwaan. "Mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu," kata Ardhito.

Keduanya didakwa atas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

Kejaksaan Agung menetapkan Helena Lim sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk pada 2015-2022. Diduga Helena turut cawe-cawe membantu menyewakan alat peleburan timah di kawasan PT Timah Tbk. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Maret 2024.

Sedangkan pengusaha Harvey Moeis resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk oleh Kejaksaan Agung pada 28 Maret 2024 lalu. Dalam kasus ini, Harvey disebut berperan melobi beberapa perusahaan untuk



Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 Helena Lim menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/8/2024).ist

menyetujui penambahan timah tanpa izin atau ilegal.

Buat Beli Lahan hingga Ruko

Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil keuntungan penampungan uang korupsi timah terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Sejumlah fakta-fakta juga turut terungkap dalam persidangan tersebut. Salah satunya mengenai uang hasil korupsi timah yang digunakan Helena Lim untuk membeli aset berupa lahan dan ruko di PIK.

Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan Helena Lim menerima sejumlah keuntungan dari menyimpan uang korupsi timah milik Harvey Moeis. Keuntungan itu senilai Rp 900 juta, dengan perhitungan Rp 30 dikalikan dengan US\$ 30 juta dolar atau setara Rp 420 miliar. Uang tersebut merupakan milik Harvey Moeis dari hasil pengamanan biaya sewa alat processing untuk penglogaman timah pertambangan ilegal.

Kemudian, dana tersebut dibuat seolah-olah merupakan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR) para perusahaan smelter swasta ilegal. Adapun keuntungan dari menampung dana itu digunakan Helena Lim untuk membeli sejumlah aset.

"Bahwa dari pengelolaan dana pengamanan seolah-olah CSR tersebut, Terdakwa Helena melalui

pada PT Quantum Skyline Exchange mendapatkan keuntungan yang selanjutnya dipergunakan untuk sejumlah pembelian," ucap Jaksa Penuntut Umum.

Sejumlah barang tersebut, adalah satu unit rumah di Jalan Pluit Karang Manis, Pluit, Jakarta Utara pada tahun 2022; satu unit ruko di Soho SOBC, Agung Sedayu, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta atas nama Helena pada tahun 2020 atau 2021; satu bidang tanah yang beralamat di PIK 2 Thamrin Center, Jakarta atas nama Helena pada tahun 2020; serta satu bidang tanah dan/atau bangunan di Jalan Mandara Permai 6A Blok L-4 Kavling Nomor 55, Pluit, Jakarta.

Helena Lim juga membeli tiga unit mobil, berupa Lexus UX300E 4x2 AT, Toyota Kijang Innova, serta Toyota Alphard. Ada juga pembelian 29 tas mewah untuk menutupi asal-usul hasil korupsi timah tersebut. Tas mewah yang dimaksud adalah tas dengan merek ternama seperti Chanel, Louis Vuitton, Faure Le Page, Lanvin, hingga Hermes.

Selain menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli sejumlah aset, Helena juga disebutkan menyimpan sejumlah uang haramnya di beberapa tempat penukaran uang atau money changer. Antara lain di PT Quantum Skyline Exchange dan PT Smart Deal dengan nominal Rp 36 miliar, yang meliputi 2 juta dolar Singapura dan Rp 10 miliar.

Uang 2 juta dolar Singapura itu disimpan di sebuah brankas milik Erik dengan nominal pecahan 1.000 dolar Singapura. Sementara uang senilai Rp 10 miliar tersimpan di kantor PT

Smart Deal.

"Terdakwa juga menyimpan sejumlah uang di dalam brankas di rumahnya, yang terdiri atas uang tunai sebesar Rp 1,48 miliar dan Rp 571,24 juta," ucap JPU Ardito Muwardi. (tro,ist,ant/dya)

DAFTAR DOSA CRAZY RICH PIK HELENA LIM DI KASUS KORUPSI TIMAH

- Helena selaku Beneficial Owner dan Manager Marketing PT Quantum Skyline Exchange dengan sengaja memberi bantuan kepada para terdakwa lain saat waktu kejahatan tindak pidana pencucian uang.
- Pencucian uang yang dilakukan yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang/surat berharga atau perbuatan lain.
- Helena membantu para terdakwa lain menukarkan uang yang berasal dari uang pengamanan seolah-olah dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari mata uang rupiah menjadi mata uang asing (Dollar Amerika maupun Dollar Singapore).
- Helena mengirimkan uang tersebut kepada Harvey Moeis, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah, Tbk di Bangka Belitung periode tahun 2015 hingga tahun 2022 yang mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp300.003.263.938.131 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
- Helena selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange menggunakan rekening orang lain atau perusahaan lain untuk menerima hasil atas transaksi penukaran uang di PT Quantum Skyline Exchange dari para pemilik Perusahaan smelter.
- Helena juga tidak pernah melaporkan kepada Bank Indonesia maupun kepada Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan juga tidak dicantumkan dalam laporan keuangan PT Quantum Skyline Exchange atas transaksi penukaran (Money Changer).
- Helena dengan sengaja menghilangkan atau memusnahkan bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh Harvey Moeis bersama-sama dengan Suparta, Thamron Alias AON, Robert Indarto, Suwoto Gunawan, Fandy Lingga, dan Rosalina.



Angka Harapan Hidup Lansia Kota Malang Lebih Tinggi Dibanding Jatim dan Nasional



Sekolah Lansia Kota Malang, Rabu (21/8/2024). (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Angka harapan hidup warga lanjut usia (lansia) di Kota Malang tertinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan tingkat nasional.

Menurut Sekretaris Daerah

(Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, angka harapan hidup lansia di Kota Malang mencapai 75,48 persen. Melampaui rata-rata angka harapan hidup di Jawa Timur yang tercatat sebesar 74,87 persen dan angka

nasional yang berada pada 73,93 persen.

"Jadi angka harapan hidup atau usia harapan hidup itu definisinya rata rata perkiraan tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir hingga akhir hidupnya," ujar Erik, Rabu (21/8/2024).

Erik menjelaskan, kenaikan angka harapan hidup di Kota Malang menandakan adanya keberhasilan dalam program-program pembangunan. Serta dukungan ekosistem dan interaksi sosial di kota Malang.

"Peningkatan angka harapan hidup ini adalah hasil dari berbagai upaya Pemkot dalam meningkatkan kualitas kesehatan, lingkungan, dan hubungan sosial di masyarakat," tambahnya.

Erik menekankan, Sekolah Lansia merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi pada angka harapan hidup lansia di Kota Malang. Program ini, sambungnya, bertujuan untuk menjaga kesehatan lansia, meningkatkan produktivitasnya, serta menyediakan platform untuk

mempererat silaturahmi antar lansia.

"Sekolah Lansia juga memberikan kesempatan bagi lansia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan generasi yang lebih muda," lanjut Erik.

Selain Sekolah Lansia, Erik menyebutkan, Pemkot Malang juga aktif dalam melibatkan lansia melalui berbagai program dan organisasi. Musrenbang tematik dan musrenbang lansia, menurutnya merupakan beberapa contoh inisiatif pemerintah untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi lansia diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Erik mengungkapkan, Kota Malang memiliki banyak organisasi lansia, seperti karang werda dan paguyuban pensiunan, yang berperan penting dalam memberdayakan lansia.

Diakhir, Erik juga menuturkan, indikator angka harapan hidup diukur setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dilaporkan ke tingkat nasional. Dimana data ini digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan di setiap wilayah. (Santi/Dya)

Usai MK Ubah Ambang Batas di Pilkada 2024

Pakar UB Sebut Partai Kecil di Kabupaten Malang Berpeluang Besar

MALANG - Perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024, membuka peluang besar bagi partai-partai kecil di Kabupaten Malang. Pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Dr. Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum, menilai aturan baru ini memberi kesempatan partai-partai berkoalisi, bahkan mengusung sendiri calonnya.

"Dengan adanya perubahan ambang batas ini, partai-partai non kursi yang sebelumnya mungkin tidak bisa mengajukan calon sendiri, kini punya peluang lebih besar dengan cara berkoalisi," ujar Aan, saat dikonfirmasi melalui sambungan selular, Rabu (21/8/2024) sore.

Dalam aturan baru poin (D) disebutkan, untuk mengusulkan calon kepala daerah, MK menetapkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu di kabupaten/kota dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih dari 1 juta jiwa, harus memperoleh suara sah minimal 6,5 persen. Sehingga Kabupaten Malang termasuk dalam aturan ini karena memiliki DPT lebih dari 2 juta.

Diketahui, berdasarkan data pemilu Februari 2024 lalu, partai-partai non kursi seperti PSI, Perindo, PPP, PAN, dan PBB di Kabupaten Malang, memiliki total perolehan

suara yang jika digabungkan mencapai sekitar 99 ribu suara, atau setara dengan 6,5 persen dari total suara sah sebesar 1.532.873 suara.

Menurut Aan, syarat 6,5 persen ini merupakan angka minimum yang harus dipenuhi oleh partai atau gabungan partai untuk bisa mencalonkan. "Ya, kalau melebihi berarti memang tidak ada masalah. 6,5 persen itu kan minimum. Justru dari situ maka mereka perlu berkoalisi agar bisa mengusung bapaslou," tambahnya.

Namun, ia juga menekankan jika koalisi partai-partai non kursi tersebut masih tidak mencapai ambang batas 6,5 persen, maka mereka tidak memiliki hak untuk mencalonkan bapaslou.

Lebih lanjut, Aan mencontohkan, dalam Pilkada Februari 2024 yang akan datang, Partai Nasdem juga menjadi salah satu partai yang berada di ambang batas tersebut. Meskipun telah memiliki 6 kursi di DPRD Kabupaten Malang, jumlah kursi ini belum mencukupi untuk mengusung calon sendiri.

Namun, dengan perolehan suara sah sebanyak 131.429, Nasdem memiliki opsi untuk tetap mengusung calon kepala daerah. Dekan Fakultas Hukum UB ini menjelaskan, Nasdem dapat menggunakan perolehan suara

sahnya untuk mengusung calon, tanpa harus bergantung pada jumlah kursi yang dimilikinya.

Aan menyampaikan, perubahan yang dilakukan oleh MK ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem demokrasi Indonesia. "Yang dulu 20 persen, sekarang turun berapa persen itu pun hanya dari jumlah suara sah, bukan dari jumlah kursi. Dari situ ada paradigma MK memperlebar atmosfer demokrasi," katanya.

Calon Tunggal, Partisipasi Turun

Di sisi lain, Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Malang 2024, memang berpotensi menghadirkan calon tunggal yakni pasangan Sanusi-Lathifah Shohib (SaLaf). Dikatakan Aan, situasi ini berpotensi menurunkan partisipasi pemilih dan mengurangi esensi demokrasi. Menurut Aan, esensi demokrasi harus diperkuat dengan keterwakilan yang luas, keterbukaan dan persaingan yang sehat, serta partisipasi publik yang aktif.



Pakar hukum dari Universitas Brawijaya (UB), Dr. Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum. (Santi/Lenteratoday)

"Kalau mayoritas parpol pemilik kursi sudah mendukung salah satu paslon. Ya, kita harus melihat dulu ada tidak partai di Kabupaten Malang yang non kursi. Kalau misalnya parpol non kursi itu suara sahnya memenuhi ambang batas minimal, ya mereka akan bisa mengajukan sendiri. Potensi inilah yang perlu dihitung di Kabupaten Malang," ujar Aan.

Dia menjelaskan, dengan banyaknya calon, pemilih akan mendapatkan berbagai pilihan dan informasi. Yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih baik. (Santi/Dya)

DUBAI GANDENG PARK SHIN-HYE DAN PARK HYUNG-SIK

DUBAI Tourism meluncurkan kampanye global baru berjudul "Dubai, Who's Ready?" yang menampilkan berbagai daya tarik kota ini bersama aktor populer Korea Selatan, yaitu Park Shin-hye dan Park Hyung-sik.

"Melalui kampanye 'Dubai, Who's Ready?', Dubai memaksimalkan kekuatan K-drama untuk menghadirkan sebuah kota yang dapat menjadi latar belakang menakjubkan bagi cerita pribadi setiap orang," kata Regional Director for Asia Pacific and Turkey at Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing Shahab Shayan di Jakarta.

Lebih lanjut, kampanye yang dirilis di saluran media sosial resmi Dubai Tourism itu menampilkan Park Shin-hye dan Park Hyung-sik yang sedang menjelajahi keindahan dan atraksi Dubai.

Keduanya juga memaknai perjalanan mereka di Dubai sambil menyaksikan warisan budaya yang tersebar di penjuru Kota Dubai.

Video kampanye itu juga menampilkan beberapa atraksi paling terkenal di Dubai sekaligus memperkenalkan pemandangan dan area kota yang belum banyak diketahui.

Beberapa lokasi yang disorot, antara lain Museum of The Future yang futuristik dengan kaligrafi Arab yang indah, Al Fahidi Historical Neighborhood, Atlantis The Royal yang

mewah, dan pertunjukan Dubai Fountain.

Tidak hanya itu, video kampanye tersebut menampilkan kawasan gurun pasir yang indah. Terletak jauh dari pusat kota, gurun pasir di Dubai cocok sebagai sarana eksplorasi sejarah sekaligus satwa liar Dubai.

"Di mana pun saya berada, mulai dari gurun pasir dan Palm Jumeirah hingga Al Seef, Dubai Fountain Show, dan Burj Khalifa, ada banyak sekali yang dapat dilihat dan dilakukan, perjalanan saya di Dubai sangat menyenangkan," kata Park Shin-hye.

Dia melanjutkan, "Saya berharap mereka yang menonton video ini terinspirasi untuk berlibur ke Dubai dan menemukan pengalaman unik serta kenangan yang tak terlupakan".

Aktor Park Hyung-sik juga membagikan pengalamannya, "Berada di Dubai terasa seperti mimpi. Saya terpukau oleh gedung-gedung tinggi yang berkilauan dari siang hingga malam".

"Saya senang dan bersyukur telah merasakan berbagai keindahan dari Dubai," ungkapnya.

Untuk menyaksikan video kampanye "Dubai, Who's Ready?" bersama Park Shin-hye dan Park Hyung-sik, kunjungi kanal YouTube @VisitDubai.

Profil Park Shin Hye

Park Shin Hye adalah seorang aktris, model dan penyanyi yang lahir pada 18 Februari 1990 di Nam-gu, Gwangju, Korea Selatan. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Park Hyun-jong dan Jo Mi-sook. Ia memiliki satu saudara laki-laki bernama Park Shin Won, yang merupakan gitaris dan komposer K-Pop.

Dikutip dari thefamouspeople.com, saat berusia 11 tahun, keluarganya pindah ke Seoul. Di Gwangju, Park Shin Hye dididik di Sekolah Dasar Hak-Kang.

Setelah pindah ke Seoul, dia mulai menghadiri Youngpa Girls High School, di mana guru bahasa Inggris kelas enam mendorongnya untuk mengikuti audisi untuk Lee's Dream Factory.

Park Shin Hye mengawali karirnya dengan menjadi salah satu pemeran di serial drama Korea Starway to Heaven pada 2003 hingga 2004.

Dikutip dari onetvasia.com, pada usia 13 tahun, ia memulai debutnya sebagai pemeran utama wanita dalam video musik "Flower" oleh Lee Seung Hwan. Namun, terobosan besarnya datang ketika dia mengambil peran sebagai karakter utama versi anak-anak Han Jung Suh dalam drama klasik Korea 'Stairway to Heaven'.

sebelum mengawali karir di dunia seni peran lebih dulu menjajal dunia musik.

Pria kelahiran 16 November 1991 ini mengawali karir sebagai anggota boyband ZE:A di tahun 2010.

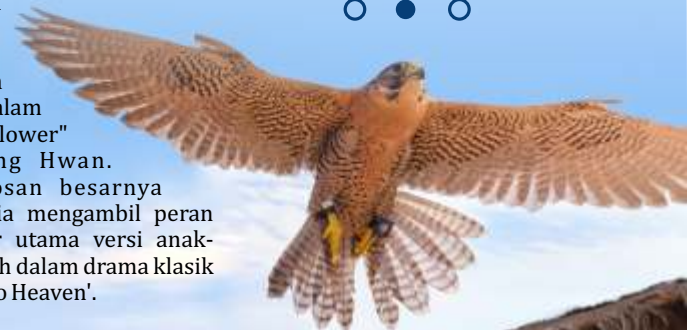
Grup ini kemudian merilis single album bertajuk Nativity dengan tittle track utama berjudul 'Mazeltov'.

Ia memulai debut di dunia seni peran bermain dalam teater musical bertajuk 'Temptation of Wolves'.

Ia tampil bersama dengan Ryeowook Super Junior kala itu.

Tak hanya membintangi teater, musikal, dan drama, Park Hyung Sik juga pada tahun 2013 membintangi reality show dengan tajuk 'Real Men'.

Berkat kemunculannya di reality show 'Real Men', Park Hyung Sik semakin dikenal eksistensinya (Antara/berbagai sumber)



Profil Park Hyung Sik

Sosok aktor
Park Hyung Sik



BUAH : INFUSED WATER ATAU DIKONSUMSI LANGSUNG

KESEHATAN tubuh seringkali menjadi perhatian utama bagi banyak orang, terutama dalam hal asupan cairan sehari-hari. Dua pilihan populer untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah buah dikonsumsi langsung dan infused water. Keduanya memiliki manfaat kesehatan tersendiri, namun memilih mana yang lebih baik tergantung pada kebutuhan dan tujuan kesehatan individu.

Meski sama-sama tersusun dari buah, dikonsumsi langsung dan infused water memiliki khasiat yang berbeda terhadap kesehatan tubuh. Kedua minuman itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa Itu Infused Water? Infused water merupakan suatu minuman yang berisi potongan buah ataupun sayur yang direndam dalam air putih selama beberapa jam.

Tak hanya menyegarkan minuman infused water ini dinilai mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Infused water menjadi minuman yang cukup populer baik dikalangan anak muda maupun orang dewasa.

Terutama bagi orang yang sedang melaksanakan program diet. Cara membuat infused water tergolong mudah yakni potong kecil buah seperti lemon dan timun lalu dimasukkan kedalam wadah yang berisi air bersih. Lalu infused water dapat dikonsumsi setelah beberapa jam perendaman. Potongan buah dan sayur didalamnya menjadikan minuman ini tampak istimewa.

Manakah Yang Lebih Baik Buah Yang Dibuat Minuman Infused Water Atau Di Konsumsi Secara Langsung? Minuman infused water memang dinilai sebagai minuman yang tampak menarik dan bermanfaat bagi sebagian orang. Namun beberapa orang justru beranggapan bahwa infused water memiliki manfaat yang lebih sedikit dibandingkan

mengonsumsi buah secara langsung. Menurut buku Variasi Favorit Infused Water Berkahsiat (2014) karya Desty Ervira Puspaningtyas S. Gz dan Yunita Indah Prasetyaningrum S.Gz karena murni berupa rendaman buah dan sayur di dalam air, tak heran jika infused water tidak memiliki serat yang baik untuk pencernaan.

Berdasarkan buku tersebut memang buah dan sayur lebih baik dikonsumsi secara langsung daripada dijadikan infused water. Karena minuman infused water hanya memiliki sedikit nutrisi dibandingkan dengan ketika kita mengonsumsi buah secara langsung. Maka kita akan mendapatkan nutrisi yang optimal dari buah tersebut. Buah yang direndam selama kurang lebih 6 jam hanya memiliki sedikit sekali manfaat.

Karena buah-buahan mengandung banyak vitamin dan serat didalamnya tetapi tidak semua kandungan didalam buah atau sayuran yang kita buat infused water tersebut dapat larut didalam air. Sehingga kandungan vitamin, serat serta kandungan lainnya hanya akan terdapat didalam buah dan hanya sedikit yang larut di dalam air.

Walaupun buah tersebut sudah direndam beberapa jam didalam air. Infused water merupakan minuman yang rendah kalori jadi dapat di konsumsi oleh semua kalangan. Minuman infused water ini juga dapat bermanfaat jika tujuan meminumnya untuk dijadikan alternatif agar terdorong untuk minum air putih lebih banyak. Buah dalam Bentuk Infused Water Kelebihan:

1. Hidrasi Lebih Baik:

Infused water adalah cara yang

menyenangkan dan segar untuk meningkatkan asupan cairan harian. Ini sangat penting karena hidrasi yang cukup mendukung berbagai fungsi tubuh, termasuk pencernaan dan regulasi suhu.

2. Rasa Alami:

Infused water memberikan rasa alami yang ringan dari buah-buahan, membuat air lebih menarik bagi mereka yang sulit minum cukup air putih. Ini juga merupakan cara yang baik untuk mendorong anak-anak dan orang dewasa yang mungkin enggan meminum air putih.

3. Variasi Rasa:

Anda dapat bereksperimen dengan berbagai kombinasi buah-buahan dan herba untuk menciptakan rasa yang sesuai dengan selera Anda. Ini juga memungkinkan Anda untuk menikmati manfaat dari berbagai jenis buah dalam satu minuman.

KEKURANGAN:

Nutrisi Terbatas: Meskipun infused water menyerap beberapa vitamin dan mineral dari buah, sebagian besar nutrisi dan serat buah tetap berada di potongan buah dan tidak sepenuhnya larut dalam air. Anda tidak akan mendapatkan asupan serat yang sama seperti saat mengonsumsi buah secara langsung.

Efektivitas yang Berbeda: Beberapa nutrisi mungkin larut lebih cepat daripada yang lain, sehingga kadar vitamin dan mineral dalam infused water bisa bervariasi dan mungkin tidak sepadat jika Anda mengonsumsi buah secara langsung.

Persiapan yang

Memerlukan Waktu:

Membuat infused water memerlukan waktu untuk memotong buah dan merendamnya. Rasa dan Kepuasan: Buah segar sering kali memberikan rasa yang lebih memuaskan dan lebih kuat dibandingkan dengan rasa yang dihasilkan dari infused water. Ini bisa menjadi camilan yang lebih memuaskan. (nei,ist/dya)



Sumber Gempa Bumi

Zona Megathrust di Indonesia

BELAKANGAN tengah ramai dibahas mengenai megathrust di Indonesia yang bisa memicu gempa besar hingga magnitudo 9,0.

Megathrust atau penunjaman sendiri memiliki zona tersendiri.

Dilansir dari PVMBG, zona penunjaman atau megathrust merupakan tempat pertemuan/interaksi antar lempeng, khususnya yang bersifat tumbukan (convergent)

Apabila interaksi tersebut melibatkan dua lempeng yang berbeda, yaitu lempeng benua dan samudera disebut subduksi, sedangkan apabila interaksi antara lempeng sejenis disebut kolisi.

Zona subduksi terbentuk akibat tumbukan antara dua lempeng yang berbeda massa jenis, yaitu lempeng benua dan lempeng samudera.

Ciri khas proses subduksi adalah terbentuknya magma pada kedalaman sekitar 150 km hingga 200 km, kemudian menerobos ke permukaan bumi dan muncul sebagai gunungapi.

Adapun mekanisme kolisi tidak demikian. Zona penunjaman dibagi menjadi dua, yaitu megathrust (dengan kedalaman penunjaman sekitar kurang dari 50 km) dan intraslab atau zona Benioff (dengan kedalaman penunjaman sekitar lebih dari 50 km).

Gempa bumi bersumber dari megathrust berpotensi menghasilkan gempa bumi dengan kekuatan besar, yaitu magnitudo lebih dari delapan sehingga berpotensi terjadi tsunami.

Isu tentang gempa bumi megathrust dan potensi terjadinya tsunami yang saat ini muncul,



sebelumnya telah muncul berkali-kali, antara lain tahun 2004, 2018, 2022 dan terakhir 2024.

Isu tersebut berkembang menjadi kekhawatiran dan keresahan masyarakat, karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam menerima informasi tersebut.

Semestinya data dan informasi tersebut dijadikan pedoman untuk meningkatkan upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami.

Zona megathrust

Zona penunjaman merupakan sumber gempa bumi utama di Indonesia yang membentang mulai dari barat Pulau Sumatera, selatan Jawa hingga Bali dan Nusa Tenggara, laut Banda, utara Papua, utara Sulawesi, timur Sulawesi Utara dan barat Halmahera.

Zona penunjaman yang mem-

bentang di barat Pulau Sumatera, selatan Jawa hingga Bali dan Nusa Tenggara dikenal sebagai Busur Sunda.

Berdasarkan catatan Badan Geologi (BG) selama tahun 2022 telah terjadi beberapa kejadian gempa bumi di selatan Banten dan Jawa Barat yang berkaitan dengan aktivitas pada zona penunjaman (megathrust dan intraslab).

Zona penunjaman Busur Sunda yang terletak di selatan Jawa saat ini cukup aktif yang dibuktikan dengan sering terjadi gempa bumi. Gaya tektonik yang bekerja pada zona penunjaman tentu akan terjadi penumpukan energi, dan suatu ketika energi tersebut akan dilepas menjadi gempa bumi.

Berdasarkan referensi yang dikumpulkan (Newcomb dan McCan, 1987; Okal, 2012) dan catatan BG,

kejadian gempa bumi di Busur Sunda setelah tahun 1900 pernah terjadi pada tahun 1903 (M 7,9), 1921 (M 7,3), 1937 (M 7,2), 1994 (M 7,8) dan 2007 (M 7,7).

Menurut perhitungan para ahli kebunian, gempa bumi bersumber dari zona penunjaman Busur Sunda terutama dari zona megathrust di selatan Jawa diperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo delapan, sehingga diperkirakan berpotensi terjadi tsunami.

Data tersebut dipergunakan untuk melakukan pemodelan bahaya gempa bumi dan tsunami dengan kondisi kasus terburuk guna mendukung upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami.

Hal ini dilakukan juga oleh BG dalam menyusun Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi (KRBG) dan Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami (KRBT).

Kejadian gempa bumi dan tsunami hingga kini belum dapat diramal menyangkut waktu, kekuatan dan lokasinya, sehingga upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan upaya mitigasi yang dilakukan secara struktural dan non struktural.

Mitigasi struktural dilakukan melalui pembangunan fisik untuk dapat mengurangi jenis-jenis bahaya gempa bumi dan tsunami.

Mitigasi non struktural dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pemerintah setempat dan penduduk yang bermukim dan beraktivitas di KRBG dan KRBT guna menghadapi ancaman potensi bencana gempa bumi dan tsunami. (Bisnis)



RISET HOTEL OCBC KETIDAK SEIMBANGAN LIFESTYLE DAN KEUANGAN PADA GENERASI MUDA

Riset terbaru dari OCBC menunjukkan bahwa generasi muda saat ini menghadapi ketidakseimbangan antara gaya hidup dan kondisi keuangan mereka. Meskipun memiliki gaya hidup yang dinamis dan penuh kegiatan, banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan dengan baik.

Bank OCBC bekerja sama dengan NielsenIQ Indonesia kembali merilis laporan Financial Fitness Index (FFI) 2024 bertajuk FUNanciallyFIT. Laporan FFI kali ini membawa pesan bahwa generasi muda termasuk perempuan bisa menjalani gaya hidup yang menyenangkan (fun) namun secara bersamaan mereka tetap sehat secara finansial (fit).

Berdasarkan laporan FFI, skor kesehatan finansial generasi muda Indonesia pada 2024 naik tipis 0,09 poin menjadi 41,25 dibanding tahun sebelumnya, yakni 41,16. Dibandingkan Singapura, angka ini jauh dari ideal, sebab Singapura ada di angka 60 poin.

Namun secara tak langsung, skor ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia telah berhasil mempertahankan kesehatan finansialnya, Ladies. Executive Director Marketing & Lifestyle Business OCBC Amir Widjaya mengatakan pencapaian ini patut diapresiasi sebab artinya bagi generasi muda mulai paham memanfaatkan produk perbankan untuk keputusan finansial yang cerdas.

"Hal ini bisa menjadi indikator adanya perubahan sikap dan mindset, terutama di kalangan muda yang tetap ingin menikmati hidup," ujar Amir di Nyala Fest 2024, Pondok Indah Mall 3, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Generasi muda masih terjebak gaya hidup FOMO. Meski skor kesehatan finansial

menunjukkan perbaikan, namun masih ada hal yang perlu diperhatikan oleh generasi muda, Ladies. Laporan FFI 2024 mengungkapkan bahwa gaya hidup Fear of Missing Out (FOMO) masih jadi jebakan di kalangan muda.

Hasil riset FFI 2024 menunjukkan 80 persen anak muda menghabiskan uang mereka untuk mengikuti gaya hidup teman-temannya. Tingginya lifestyle FOMO pada generasi muda juga menunjukkan bahwa generasi ini masih fokus pada kesenangan jangka pendek.

Sebanyak 39 persen generasi muda mengaku bahwa tujuan utama mereka menabung adalah untuk memenuhi kebutuhan lifestyle seperti membeli barang mewah, hobi mewah, dan travelling. Generasi muda mulai melek soal dana darurat. Meski masih sering FOMO, namun generasi muda ternyata sudah cukup melek soal menyalipkan uang untuk dana darurat, lho, Ladies.

Director Consumer Insights di NielsenIQ (NIQ) Indonesia Inggit Primadevi mengungkapkan bahwa, anak muda Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan perubahan positif dalam perilaku keuangan. Hal ini terlihat dari tingkat literasi keuangan yang tinggi, mulai mencatat keuangan, dan memiliki dana darurat.

Dari mereka yang sudah mencatat keuangan, 41 persen di antaranya sudah memiliki dana darurat sebesar 6 bulan gaji, angka ini naik sebesar 12 persen dari tahun sebelumnya. Sementara anak muda yang belum melakukan pencatatan keuangan, baru 21 persen yang punya dana darurat.

"Hal ini menandakan peningkatan kesadaran akan literasi keuangan, bukan hanya dalam pengetahuan tapi juga dalam praktik, dengan memiliki dana darurat dan menerapkan

kebiasaan mencatat keuangan mereka," ujar Inggit. Temuan-temuan dalam FFI 2024 ini menunjukkan bahwa generasi muda masih memerlukan literasi keuangan yang lebih baik agar bisa membuat keputusan pengeluaran yang lebih bijak.

Salah satu caranya yaitu dengan memahami produk dan layanan perbankan sehingga generasi muda bisa mendapat manfaat secara maksimal. Amir mengatakan generasi muda bisa memilih OCBC sebagai layanan perbankan yang mudah diakses dan dipahami.

Selain itu, OCBC juga berkomitmen untuk membantu generasi muda agar disiplin finansial dalam jangka panjang. Dengan demikian, generasi muda tetap dapat memiliki gaya hidup yang menyenangkan sekaligus

mengelola keuangan dengan tepat. "Gaya hidup yang melek finansial, bisa menabung, melek investasi, bukan berarti nggak bisa bersenang-senang. Generasi muda tetap bisa enjoy, bisa nonton konser, tapi kondisi finansialnya tetap sehat," tutup Amir. (nei,ist/dya)

“

Hal ini menandakan peningkatan kesadaran akan literasi keuangan, bukan hanya dalam pengetahuan tapi juga dalam praktik, dengan memiliki dana darurat dan menerapkan kebiasaan mencatat keuangan mereka," ujar Inggit.



MK Ubah Aturan Pilkada... (dari Hal 1)

PUISI Okky Madasari yang menyertai unggahan Peringatan Darurat di dunia maya, Rabu (21/8/2023) menyita perhatian. "Peringatan Darurat. Buk, negara kita darurat/ dipimpin penjahat/ yang terbahak-bahak/ melihat aturan diacak-acak/ dikuasai pengkhianat/ yang tetap tidur nyenyak/ saat rakyat berteriak-teriak. Buk, aku pamit/ turun ke jalan/ sampai menang," dikutip dari akun X@okkymadasari.

Fiersa Besari dan Arie Kriting juga menggaungkan hal yang sama. "Diacak-acak terang-terangan," tulis Fiersa Besari pada Rabu (21/8/2024).

"Merdeka! Hidup lah Indonesia Raya," cuit Arie Kriting dengan menaruh emotikon bendera Merah Putih Indonesia.

Unggahan ini berawal dari akun @narasinewsroom, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasi.tv di Instagram dan X. Tidak ada keterangan tertulis pada unggahan tersebut, hanya tertulis peringatan darurat di atas gambar Burung Garuda.

Komika lain, Bintang Emon, juga memasang darurat darurat di akun Instagramnya. Sutradara film Joko Anwar juga mengunggah gambar ini di akun Instagramnya. Selain pesohor, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, juga mengunggah gambar peringatan darurat di akun X miliknya.

Terkait Peringatan Darurat, gambar itu merupakan potongan video yang diunggah akun YouTube EAS Indonesia Concept, akun YouTube yang membuat video dengan konsep The Emergency Alert System (EAS) versi Indonesia.

EAS merupakan sistem peringatan kedaruratan nasional Amerika yang didesain untuk menyebarkan pesan darurat di tengah siaran televisi dan radio. Dalam unggahan-unggahannya, akun EAS Indonesia Concept menggunakan metode EAS untuk membuat video horor fiktif yang dikenal sebagai analog horror.

Semua bermula setelah MK pada Selasa (20/8/2024) memutus dua gugatan terkait Pilkada 2024.

Satu, mengabulkan soal partai tak punya kursi di DPRD bisa mencalonkan kandidat serta penyelesaian ambang batas (threshold) suara sah buat mengajukan calon. Putusan itu bisa berdampak positif ke pencalonan Anies Baswedan/Basuki Tjahaja Purnama.

Yang lainnya, memutus syarat usia minimal calon kepala daerah dilakukan sejak KPU menetapkan pasangan calon, bukan sejak calon terpilih dilantik. Putusan itu berpotensi berdampak pada Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi.

Selang sehari, Rabu (21/8/2024), Panitia Kerja RUU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.

Itu berpotensi jadi kabar buruk buat PDIP, partai yang hingga kini

belum mengumumkan calon pimpinan daerah, terutama di Jakarta. Hampir seluruh partai sudah mendukung dan mengusung Ridwan Kamil dan Suswono.

Selain itu, syarat usia minimal calon kepala daerah juga dihitung saat pelantikan paslon mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut membuat anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, bisa mengikuti Pilkada 2024.

"Setuju ya Merujuk pada putusan Mahkamah Agung ya? Lanjut?" tanya Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada di kompleks parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Rumusan DIM nomor 72 yang disetujui Panja RUU Pilkada itu berbunyi usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota termasuk sejak pelantikan pasangan terpilih.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk partai politik. Melalui putusan ini, partai politik atau partai politik gabungan yang tidak mendapatkan kursi di DPRD tetap bisa mencalonkan calon gubernur dan wakil gubernur selama memenuhi perolehan suara yang disyaratkan MK. Ada empat klasifikasi besaran suara sah berdasarkan putusan MK, yaitu; 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen dan 6,5 persen, sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait. Syarat besaran suara sah untuk Jakarta adalah 7,5 persen. Dengan ketentuan ini, PDIP dan Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jakarta.

Ketentuan ini kemudian dimasukkan ke dalam draf Pasal 40 RUU Pilkada. Namun panitia kerja DPR RI hanya menyepakati penurunan syarat ambang batas Pilkada hanya berlaku bagi partai yang tak memiliki ketua DPRD. Dalam Daftar Inventarisasi Masalah yang dibacakan dalam rapat Panja RUU Pilkada, partai politik yang mendapatkan kursi parlemen daerah tetap menggunakan syarat lama ambang batas Pilkada. Akibatnya, PDIP dan Anies terancam tidak bisa mengikuti Pilkada.

"Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan," bunyi ketentuan tersebut.

Fraaksi PDI Perjuangan sempat memprotesnya. Anggota Baleg dari PDI Perjuangan, Putra Nababan, mempertanyakan Achmad Baidowi yang langsung menerima putusan Mahkamah Agung. "Sudah dihitung per fraksi siapa setuju dan tidak setuju?" kata Putra Nababan.

Achmad Baidowi menolak mengakomodasi pendapat Putra Nababan. Legislator Partai Persatuan Pembangunan itu beralasan bahwa Fraksi PDIP sudah diberi kesempatan untuk berbicara sebelumnya.

"Yang penting Fraksi PDIP sudah sampaikan pendapat. Saya kira fair saja kan," kata Achmad Baidowi dengan nada tinggi.

Rapat Panja Baleg dan pemerintah membahas revisi UU Pilkada ini tetap berlanjut. Dalam rumusan Baleg, banyak pasal yang mengalami perubahan. Sesuai rencana, Panja Baleg akan membawa hasil rapat panja bersama pemerintah itu dalam rapat pleno malam ini. Lalu DPR akan mengagendakan rapat paripurna pengesahan hasil revisi menjadi undang-undang pada Kamis (22/8/2024).

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Dewa Gede Palguna merespons hasil rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mengenai revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Undang-Undang Pilkada). Palguna menilai Baleg sudah membangkang terhadap konsistituti karena mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Pembangkangan terhadap konstitusi itu," kata Palguna saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Rabu, (21/8/2024).

Ia mengatakan pembangkangan terhadap konstitusi itu dapat dilihat dari hasil rapat Baleg DPR. Tapi Palguna tidak secara gampal menjelaskan hasil rapat Baleg tersebut.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, mengungkapkan konsekuensi yang terjadi akibat putusan MK tersebut dilanggar. Menurutnya, hal itu akan membuat legalitas pelaksanaan Pilkada bermasalah secara hukum.

"Terjadi pelanggaran terhadap konstitusi dan berpeluang diuji kembali ke MK. Dan legalitas pemilu bermasalah secara hukum," ujar dia kepada wartawan, Rabu (21/8/2024).

Charles menyebut, putusan MK yang tak dipatuhi akan berdampak pada penetapan pasangan calon pemenang Pilkada yang dinyatakan tidak sah ketika ada gugatan sengketa di MK.

"Bahkan potensial jadi alasan dalam pengajuan sengketa Pilkada," jelasnya.

"Karena [pelaksanaannya] berdasar pada UU yang tak sesuai putusan MK," pungkas Charles.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) akan demo besar-besaran menanggapi revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"BEM SI akan turun besar-besaran di depan DPR RI," ujar Koordinator Pusat BEM SI Herianto Rabu (21/8/2024). Heri menyampaikan, aksi ini akan dilakukan sesegera mungkin. Malam ini, BEM SI tengah melakukan konsolidasi serentak di

seluruh Indonesia. Hal serupa bakal dilakukannya para buruh.

Tidak lama setelah DPR menyampaikan hasil rapat, BEM SI dan sejumlah masyarakat Indonesia ramai-ramai mengunggah foto berlatar biru dengan logo garuda dan tulisan "Peringatan Darurat". Tertera pula tagar #kawalputusanMK.

Jokowi Sebut Proses Konstitusional

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pihaknya menghormati keputusan dari masing-masing lembaga.

"Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara," kata Jokowi dalam keterangan persnya, Rabu (21/8/2024).

Jokowi menuturkan, setiap lembaga negara memiliki kewenangan masing-masing. Keputusan itu merupakan hak konstitusional setiap lembaga.

"Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki," ucap dia.

Presiden Jokowi juga menyayangkan soal 'si tukang kayu' dalam sambutannya di acara penutupan Munas Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

"Bapak Ibu saudara yang saya hormati, saya muliakan, ini 2 hari ini kalau kita lihat di media sosial sedang riuh sedang ramai setelah putusan yang terkait pilkada," kata dia.

"Setelah saya lihat di media sosial salah satu yang ramai tetap tentang si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu itu siapa," sambung Jokowi yang memang sempat jadi pengusaha mebel ini disambut tawa kecil hadirin.

Yang dimaksud Jokowi adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi dan Hasil Rapat Baleg terkait Pilkada. Salah satunya yang ramai dibahas adalah Putusan MK No 70 soal batas usia 30 tahun saat penetapan yang 'tak dianggap' Baleg DPR.

Hal ini mencuatkan isu Baleg DPR menciptakan itu dan menguntungkan putra Presiden, Kaesang Pangarep, yang baru berusia 30 tahun di akhir tahun.

Bila DPR patuh pada putusan MK, Kaesang tak bisa daftar Pilgub karena ada diksi berusia 30 tahun saat penetapan. Sementara penetapan calon itu 22 September, ulang tahun Kaesang 25 Desember.

"Padahal kita tahu semuanya yang membuat putusan itu MK, itu adalah wilayah yudikatif. Dan saat ini yang sedang dirapatkan di DPR itu wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah tukang kayu," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, padahal ranah tersebut bukan ranahnya. Katanya, ia selalu menghargai keputusan lembaga tinggi negara.

"Ya tidak papa itu warna warni demokrasi. Yang perlu saya sampaikan sebagai lembaga eksekutif sebagai Presiden, saya kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan masing-masing lembaga negara," tutup dia. (tro,rks, ant,kcm,tmp/dya)

Memanas! PBNU Targetkan Pembersihan DPP PKB



JAKARTA-Pansus PKB bentukan PBNU menargetkan pembersihan DPP PKB. Mereka akan menjadikan PKB sesuai keinginan alim ulama, pendiri NU, dan pengurus NU.

Hal ini disampaikan perwakilan tim pansus PKB bentukan PBNU pasca tak hadirnya Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Plaza PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta, pada Rabu (21/8/2024).

"Ini yang akan kita bereskan, akan kita bersihkan DPP PKB itu menjadi PKB sesuai dengan harapan para alim ulama, para pendiri NU, dan para pengurus NU," ujar ketua PBNU Habib Umarsyah.

Selanjutnya, Umarsyah menjelaskan bahwa sejauh ini, temuan paling krusial dari pansus PKB adalah dokumen AD/ART yang menjelaskan PKB seharusnya dikembalikan ke PBNU.

"Termaktub dalam dokumen AD/ART, jadi kalau teman-teman bisa melihat pada bab 13 mengenai pembubaran, spesifik lagi pasal 31, spesifik lagi ayat 4, jadi disampaikan bahwa dalam hal pembubaran partai, maka kekayaan partai, dalam hal ini PKB, diserahkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," ujarnya.

U marsyah menjelaskan, kesimpulan atau hasil dari kinerja pansus PKB akan diumumkan ke publik oleh ketua pansus, K. H. Anwar Iskandar.

"Itu menjadi kewenangan dari Kiai Haji Anwar Iskandar sebagai ketua tim. Inshaallah satu-dua hari ini akan dikeluarkan secara utuh ke publik, kalau itu beliau anggap perlu," ujar Umarsyah.

Artinya, hasil dari kinerja pansus akan diumumkan sebelum Mukhtar VI PKB di Bali pada 24-25 Agustus mendatang.

Mukhtar PKB sendiri merupakan forum tertinggi partai untuk memilih ketua umum dan membahas program kerja PKB jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 serta membahas perkembangan arah partai

politik Indonesia menuju tahun 2029.

Forum tersebut akan dihadiri oleh 2.700 peserta yang terdiri dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Syuro, dan kader PKB lainnya.

Cak Imin Tak Penuhi Panggilan

Diketahui, Cak Imin tak menghadiri panggilan PBNU ke plaza PBNU pada Rabu (21/8/2024). Mulanya Cak Imin diminta datang pada pukul 12.30 WIB.

Pada pukul 13.58 WIB, tim pansus PKB menyatakan Cak Imin tak hadir setelah ditunggu selama 1,5 jam.

Cak Imin bukan pejabat PKB pertama yang tak menghadiri panggilan Pansus. Sebelumnya, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid juga tak penuhi panggilan Pansus PKB PBNU pada Senin (5/8/2024) lalu.

Cak Imin menyampaikan permohonan maaf tidak hadir di PBNU, meskipun ia mengaku sengaja tak memenuhi panggilan tersebut.

"Hari ini, saya diundang oleh PBNU melalui sebuah surat. Nah, saya mohon maaf enggak datang karena saya sengaja enggak datang," ujar dia kepada wartawan di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

la lalu menyinggung perbedaan pendirian antara PKB dengan PBNU. Cak Imin meminta PBNU mesti taat terhadap konstitusi.

"Kenapa saya tidak datang karena saya ingin menegakkan konstitusi di mana partai politik PKB berdiri di atas konstitusi undang-undang partai politik. NU berdiri di atas undang-undang organisasi kemasyarakatan," kata Cak Imin.

"Sehingga, kalau kita mau taat kepada konstitusi, jangan saling mencampuri urusan yang diatur oleh konstitusi negara," tegasnya.

Cak Imin juga berharap PBNU dapat mengelola organisasinya tanpa mencampuri urusan PKB.

"Karena itu saya berharap betul

kepada PBNU untuk betul-betul mengelola organisasi sesuai dengan tata krama konstitusi dan sesuai dengan aturan konstitusi," ucap dia.

"Sehingga, mohon maaf saya tidak akan bisa memenuhi undangan PBNU," pungkasnya.

Perseteruan PKB vs PBNU masih terus berlanjut. Perseteruan dipicu pembentukan Pansus Haji yang dimotori Cak Imin sebagai Wakil Ketua DPR dan Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2024. Pansus Haji ini otomatis akan menyoroti kinerja Menteri Agama Gus Yaqut.

PBNU membalasnya dengan pembentukan Pansus PKB dan berusaha "merebut" PKB yang dilahirkan dari rahim PBNU di awal

masa reformasi. Saling serang kata pun terjadi di kedua kubu. Selain itu, KH Umarsyah mengata-kan secara legal hubungan PKB dengan PBNU memang tidak ada. Namun, PKB punya hubungan historis dengan PBNU.

"Kalau dilihat secara formal perundang-undangan iya. Tetapi, kan di sini persoalannya bukan hanya sekadar hal yang formal. Ada hal-hal yang informal yang merupakan komitmen dasar dalam pendirian PKB itu oleh PBNU," kata Umarsyah.

Umarsyah menyebut hubungan historis PKB dan PBNU termaktub dalam pelbagai dokumen pembentukan PKB jadi partai politik. Menurut dia, PBNU punya andil dalam mendirikan PKB. (tro,rls,ant/dya)

UNTAG SURABAYA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Guest Star

UNTAG SURABAYA EXPO
&
DIESNATALIS KE-66 UNTAG SURABAYA

MALIQ & D'ESSENTIALS

Untag Surabaya
Bikin Romantis

28
Agustus
2024

PENDAFTARAN MAHASISWA BARU UNTAG SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

JALUR
REGULER

JALUR
PRESTASI

JALUR
HYBRID

JALUR
RPL

- Tersedia Pilihan Kelas Pagi / Kelas Sore
- Potongan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) 10% - 100%
- Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Bisa Diangsur
- Potongan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) bagi Anak Alumni Untag Surabaya
- Potongan Dana Pengembangan Pendidikan bagi Alumni Untag Surabaya yang melanjutkan studi ke Program Magister/Doktor Untag Surabaya
- Potongan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) bagi warga yang berdomisili di Kecamatan Sukolilo Surabaya

10%

POTONGAN
DPP/ANG GEDUNG

UNTUK PENDAFTARAN
PROGRAM S1
UNTUK GELOMBANG II

01 Juli - 31
Agustus 2024

HOTLINE PROGRAM 03 & 01
0811 - 300 - 1716

HOTLINE PROGRAM 02 & 02
0813 - 5748 - 7129